

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PERSEDIAAN BARANG HABIS PAKAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI KABUPATEN MINAHASA

Tesalonika P.V Tombuku¹, Jhony Manaroinsong²

¹Jurusan Akuntansi, Universitas Negeri Manado, Tondano

email: tesalonikapv07@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi persediaan dengan standar yang berlaku, yang di terapkan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Manusia di Kabupaten Minahasa. Pengakuan persediaan, pengukuran persediaan, dan pengungkapan persediaan merupakan bagian dari akuntansi persediaan yang di maksudkan. Standar yang di maksud dalam penelitian ini ialah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 05 tentang akuntansi persediaan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Teknik pengumpulan data yang di gunakan ialah dokumentasi. Dokumentasi merupakan pengumpulan data-data yang mendukung penelitian ini, seperti bukti transaksi, jurnal, hingga laporan keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun anggaran 2019. Analisis deskriptif kualitatif ialah teknik yang di gunakan untuk menganalisa data yang ada. Yang di dihasilkan dalam penelitian ini ialah akuntansi persediaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Minahasa sebagian besar telah mengikuti peraturan dan standar yang di tetapkan. Yang belum menggunakan basis akrual ialah pengakuan persediaan dengan menggunakan pendekatan beban.

Kata Kunci: Akuntansi Persediaan, Penerapan Akuntansi Persediaan, Barang Habis Pakai

Abstract

The study aims to know how to match the application of supply accounting to the prevailing standards applied to Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Minahasa. The accounting of the inventory in questiom includes nventory recognition, measuring off supplies and full di sclosure of provisions. The standard referred to in this study is the acrual number 5 statemen on public accounting for provision 71 in 2010. The techhnique for collecting data is documenting the documentation is collecting data thats supports this research, such as transaction evidence, journals, to the financial statements of the employment agency and development of human resources year 2019. Analysis conducted using qualitative descriptive analysis techniques. The study suggests that the accounting for human resources and development in Minahasa di strict is lergely up to current standarts. As for inadequate accounting treatment, among other things; supply confession with a burden approach not using akrual basis.

Key words; supply accounting, supply accounting application, consumables

Pendahuluan

Dalam aktivitas pemerintahan perlu adanya transparansi, akuntabel, serta efisiensi sehingga menciptakan tata pemerintahan yang baik dalam bidang akuntansi sektor publik. Tata pemerintahan sektor publik akan sangat berpengaruh dalam kemajuan suatu daerah. Pengelolaan sektor publik sangat berpengaruh dalam pengelolaan keuangan yang merupakan faktor penunjang dalam negeri. Sektor publik bisa memberikan dampak yang cukup besar apabila terjadi kekacauan dalam sektor publik misalnya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang bisa berpengaruh pada sektor lainnya. Sektor publik merupakan instansi yang di kelola di bawah pemerintah pusat maupun daerah. Otonomi daerah di perlukan untuk pengembangan lebih lanjut pelayanan publik dan kesejahteraan secara demokratis, egaliter, adil dan berkelanjutan. Kewajiban ini bisa di penuhi apabila pemerintah daerah bisa mengelola potensi sumber daya alam, manusia, dan keuangan dengan sebaik-baiknya serta menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Dalam transparansi keuangan juga sangat penting dalam peningkatan kepercayaan dari masyarakat karena pemerintah yang terbuka dalam pelaporan keuangan lebih baik di banding dengan pemerintah yang lebih tertutup karena bisa di nilai

pemerintah melakukan penyelewengan keuangan (Salle, 2017). Tuntutan transparansi dalam sistem pemerintahan semakin meningkat di masa reformasi saat ini, termasuk transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Kewajiban negara ialah menyusun laporan pertanggungjawaban dengan menggunakan sistem akuntansi yang di atur pemerintah berupa undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengikat semua pemerintah daerah. (Akhir & Hakim, 2010)

Tujuan dari di dirikannya sektor publik ialah untuk memberikan fasilitas, pelayanan, dan kemudahan bagi semua masyarakat (Psap et al., 2021). Basis akrual yang tertuang dalam PP No.71 tahun 2010, tujuannya ialah agar pelayan publik lebih optimal karena yang sebelumnya standar yang berlaku yaitu PP No.24 tahun 2005 yang melakukan pencatatan kas menuju akrual dan setelah itu di ganti dengan PP No.71 tahun 2010 yang melakukan pencatatan secara akrual. SKPD (satuan kerja perangkat daerah) ialah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi supaya penyelenggaraan pemerintah bisa berjalan dengan baik. Karena basis akrual ini sehingga membuat SKPD belum bisa sepenuhnya menyesuaikan dengan basis akrual.

(Rifai et al., 2016) SAP merupakan Standar Akuntansi Pemerintah yang di tetapkan pemerintah untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan sehingga SAP menjadi persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. (Unggul et al., 2020) Penerapan SAP di lingkungan pemerintahan berdampak pada kualitas laporan keuangan baik pemerintah pusat maupun kementerian dan pemerintah daerah (Pemda) serta pelayanannya, sehingga menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan.

Pasokan dalam pemerintahan di pengaruhi oleh karakteristik lembaga pemerintah yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Inventarisasi ini di gunakan untuk mendukung kegiatan operasional di pemerintahan karena inventaris tersebut termasuk dalam aset lancar dan langsung di gunakan dalam jangka waktu 12 bulan setelah pelaporan. (Akhir & Hakim, 2010)

Persediaan perlu di hitung dengan cermat agar bisa di kendalikan yang artinya persediaan tersebut tidak kekurangan ataupun kelebihan karena bisa menimbulkan hal-hal yang tidak menguntungkan. Misalnya pada saat kekurangan persediaan akan mengakibatkan kebutuhan yang di minta tidak terpenuhi dan sebaliknya ketika persediaan kelebihan akan berakibat pada tingginya resiko penyimpangan (Psap et al., 2021)

Pada saat ini tuntutan masyarakat untuk melakukan akuntansi pemerintahan menjadi sangat penting karena semakin besar dana yang di kelola oleh pemerintah maka semakin besar pula tuntutan akuntabilitas keuangan yang lebih baik. Konsep pemerintahan lebih banyak di pengaruhi sebagai institusi politik, tetapi walaupun aspek ekonominya tidak bisa di abaikan, konsep akuntansi pemerintahan itu sendiri tidak bisa di pisahkan dari pengertian akuntansi secara umum. (Albar et al., 2018)

(Irawati, 2016) Siklus akuntansi merupakan tahapan dari realisasi transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan sehingga siap untuk pencatatan selanjutnya. Dengan demikian maka siklus akuntansi bertujuan untuk mencatat setiap transaksi sampai laporan keuangan selesai di sajikan dan siap untuk di pakai. Pentingnya persediaan barang habis pakai dalam mengoperasikan kegiatan untuk melakukan pelayan terhadap masyarakat, yang artinya tanpa adanya barang habis pakai ini akan sulit untuk melakukan aktivitas dan kegiatan dalam kantor karena barang habis pakai ialah faktor penunjang untuk kegiatan kantor.

Komite Standar Akuntansi pemerintah (KSAP) ialah komite standar akuntansi negara independen yang di bentuk dengan keputusan presiden, yaitu Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2009.. Selain itu juga dalam penyusunan standar akuntansi pemerintahan (SAP), KSAP juga memiliki kewenangan menerbitkan publikasi lainnya seperti Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) dan Buletin Teknis (Ninla Elmawati Falabiba, 2019) Basis akuntansi akrual ialah basis akuntansi di mana setiap transaksi dan peristiwa lainnya akan di akui, di catat dan di sajikan dalam laporan keuangan pada saat transaksi terjadi,

terlepas dari kapan kas atau setara kas di terima atau di bayarkan oleh KSAP. Perbedaan dari basis akrual dan basis kas ialah konsep pengakuan belanja dan pendapatan pada suatu periode.

(Unggul et al., 2020) menyatakan bahwa Persediaan ialah aset lancar yang sumber daya ekonominya di miliki oleh pemerintah sebagai akibat dari masa lalu dan berguna bagi pemerintah dan masyarakat di masa depan dan bisa di ukur dalam mata uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang di butuhkan oleh penyedia jasa. Masyarakat umum dan sumber daya di lindungi karena alasan sejarah dan budaya (Paragraf 5 No 71 Tahun 2010).

Pada PSAP BA No. 05 Paragraf 4 PP No. 71 Tahun 2010 di jelaskan bahwasanya Suatu aset bisa di klasifikasikan sebagai persediaan jika memenuhi salah satu kriteria berikut: Barang yang di gunakan untuk operasi pemerintah, dan barang dalam kelompok ini ialah barang habis pakai, barang tidak habis pakai, dan barang bekas. Material atau peralatan (materials) yang akan di gunakan dalam proses manufaktur. Persediaan dalam kelompok ini ialah bahan-bahan dalam proses produksi, seperti bahan baku yang di gunakan untuk membuat alat-alat pertanian. Barang dalam proses produksi untuk di jual atau di serahkan kepada masyarakat. Alat pertanian setengah jadi bisa di berikan sebagai contoh bahan habis pakai yang termasuk dalam kelompok ini. Barang yang di simpan untuk di jual atau di serahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Contohnya ialah hewan/tumbuhan. (Irawati, 2016)

Persediaan ialah bagian yang penting dalam melaksanakan kegiatan operasional untuk melayani masyarakat. aset lancar berupa barang atau peralatan yang di tujukan untuk menunjang kegiatan operasional pemerintahan, seperti persediaan, barang habis pakai, barang tidak habis pakai, dan barang bekas. Melayani masyarakat dengan populasi yang begitu besar tanpa pasokan akan sulit bagi pemerintah untuk melayani. Kegiatan di instansi pemerintah juga akan terganggu tanpa persediaan, karena persediaan barang penunjang untuk menjalankan administrasi dan perkantoran di instansi pemerintah. (Irawati, 2016)

Barang habis pakai ialah barang yang di gunakan dalam kegiatan operasional jadi bisa di simpulkan bahwa barang habis pakai merupakan bentuk perlengkapan yang di gunakan oleh instansi dan faktor penunjang dalam kegiatan operasional (Rezagi Meilano, 2020)

Dalam mengelola barang habis pakai (ATK) di lakukan oleh penyimpan barang. Dalam pembuatan laporan keuangan barang habis pakai penyimpan barang harus mencatat semua aktivitas yang terjadi. Pencatatan di lakukan mulai barang di terima, barang di keluarkan, sampai barang tersebut di salurkan pada setiap bagian yang memerlukan barang. Tujuan pengelolaan barang habis pakai (ATK) ialah untuk mengetahui barang dan barang yang masih ada di gudang atau membandingkan jumlah barang yang masih dalam persediaan barang habis pakai (ATK). Hal ini di lakukan untuk memudahkan pengelola dalam menyusun laporan bulanan yang di sesuaikan dengan kebutuhan perencanaan dan penganggaran hingga pengadaan bahan habis pakai (ATK) pada tahap selanjutnya. (Rezagi Meilano, 2020)

Penyimpan barang sekaligus pengelolaan barang habis pakai memerlukan ketelitian dalam mencatat keperluan dan kebutuhan barang habis pakai di setiap bagian. Agar bisa terlihat ketersediaan jumlah barang habis pakai yang sudah terpakai dan apa saja yang belum sehingga bisa di bandingkan dengan kebutuhan yang tersedia. Hal ini mempermudah staff pengelola barang melakukan pemenuhan barang yang di perlukan sesuai dengan anggaran yang akan di adakan. Untuk mencapai tujuan pelaksanaan kegiatan usaha, di tunjang dengan adanya alat kantor. Peralatan kantor ialah media yang membantu untuk pencapaian tujuan yang di inginkan.

Dalam pencapaian tujuan dalam pelaksanaan kegiatan tata usaha, tentu perlu adanya alat kantor untuk menunjang kegiatan dalam kantor. Sehingga bisa di definisikan bahwa alat kantor ialah suatu media dalam upaya mencapai tujuan yang di inginkan. Jika peralatan kantor tidak di penuhi bisa berdampak pada kinerja yang tidak maksimal dan hasil pekerjaan akan tidak sesuai dengan waktu yang di tentukan. Dalam kegiatan inilah sering di temukan penyalahgunaan karena dalam pencatatan barang habis pakai dalam Badan Kepegawaian

Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ada beberapa barang yang bisa di gunakan berulang kali dalam waktu yang cukup lama namun di setiap bulannya Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya manusia ini melakukan pembelian secara berulang (sumber: catatan transaksi harian persediaan keluar). Sehingga dalam pencatatan pada BKPSDM ini tidak sesuai dengan tujuan dari aktivitas pemerintahan yaitu dengan menciptakan tata pemerintahan yang baik karena tidak efisien dalam penggunaan barang. Menurut Arif, dkk (2013:2) dalam (Waworega et al., 2018) tujuan dari akuntansi pemerintahan yaitu: Akuntabilitas. Keuangan Negara harus di olah dengan baik sehingga bisa di pertanggungjawabkan. Manajerial. Akuntansi Pemerintahan melakukan perencanaan dalam penyusunan APBD untuk mendukung kegiatan serta strategi pembangunan dalam mencapai ketaatan pada peraturan undang-undang, efektif dan efisien. Pengelolaan sumber daya manusia di pastikan di lakukan dengan baik agar supaya bisa memberikan kontribusi secara optimal dan mengupayakan pencapaian tujuan organisasi (Mahardini & Miranti, 2018)

Tujuan laporan keuangan ialah agar informasi yang di terima menentukan dan memprediksi kondisi dan perubahan ekonomi dalam suatu unit pemerintahan. Memberikan informasi keuangan untuk memantau kinerja kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, kontrak yang di sepakati dan kondisi yang di persyaratkan (Freddy S. Kawatu 2019). Laporan keuangan juga memuat informasi penting untuk memenuhi kepentingan penyandang dana. (Harahap, 2007) dalam bukunya A Statement of Basic Accounting Theory (ASOBAT), sebagaimana di kutip dan di terjemahkan olehnya, merumuskan berbagai tujuan laporan keuangan dalam menyelesaikan penggunaan aset yang terbatas dan mencapai tujuan serta mengendalikan Sumber Daya Manusia (SDM) dan lainnya. produksi. faktor, pemeliharaan dan pelaporan perlindungan terhadap properti untuk membantu fungsi dalam kontrol sosial (Psap et al., 2021)

Pencatatan di setiap transaksi keuangan sangatlah penting untuk itu sesuai dengan informasi yang di berikan oleh petugas pengelolaan barang persediaan bahwa dalam pencatatan transaksi persediaan barang habis pakai tidak melakukan pencatatan stock opname karena tidak ada format baku laporan stock opname. Dalam penelitian ini tujuannya ialah mengetahui kesesuaian penerapan yang sudah di terapkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Minahasa dan standar yang berlaku.

METODE

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang menggunakan data kualitatif dan di deskripsikan secara deskriptif. Jenis penelitian kualitatif ini di gunakan untuk menganalisis kondisi sosial, yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap tentang kondisi sosial; Metode analisis data ini juga menganalisis suatu data atau situasi dengan teori-teori dan kemudian sampai pada suatu kesimpulan. (Umboh et al., n.d.). Variabel dalam penelitian ini ialah akuntansi persediaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Minahasa. Informasi data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi yang kemudian di analisa secara kualitatif dan setelah itu akan di jawab sesuai dengan dengan penerapan akuntansi persediaan barang habis pakai. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua (PSAP BA) yang ada kaitannya dengan persediaan yang di tuangkan dalam peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010, merupakan standar yang akan di pakai dalam penelitian ini.

Akuntansi persediaan ialah semua hal yang terkait dalam proses pencatatan ke dalam buku besar akuntansi. Untuk Pengumpulan data yang di lakukan dalam melengkapi dokumen yang di perlukan yaitu dalam penelitian ini ialah perlu di lakukannya pengamatan (*observation*), setelah itu wawancara (*interview*) dan yang terakhir study pustaka (*documentation study*). Data yang akan di pakai dalam penelitian ini seperti catatan umum persediaan masuk dan persediaan keluar, jurnal dan laporan keuangan yang di ambil di bagian keuangan serta dokumen lainnya yang melengkapi penelitian ini.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang awalnya mengumpulkan data yang sudah ada kemudian di olah, di analisa dan selanjutnya di nterprestasikan agar bisa terlihat perbandingan antara penerapan yang sudah di lakukan oleh BKPSDM di Kabupaten Minahasa dan penerapan yang berlaku ialah PSAP BA no.71 tahun 2010. bisa terlihat dan tergambar tentang pencatatan persediaan yang di lakukan oleh SKPD-BKPSDM (Satuan Kerja Perangkat Daerah-Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) yang nantinya akan di tindaklanjuti pengidentifikasian pencatatan persediaan, dalam laporan keuangan BKPSDM kemudian di analisa pecatatan pengakuan, pengukuran dan pengungkapan persediaan SKPD-BKPSDM di Kabupaten Minahasa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Akuntansi Persediaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) di Kabupaten Minahasa. Pengakuan Persediaan BKPSDM Kabupaten Minahasa, sesuai dengan presentasi data dalam jurnal-jurnal yang terkait dengan pencatatan persediaan, kesimpulannya ialah BKPSDM menggunakan dua metode pendekatan dalam pencatatan pengakuan pembelian persediaan, yaitu BKPSDM menggunakan pendekatan aset dan menggunakan basis akrual. Sementara yang di akui oleh persediaan BKPSDM Kabupaten Minahasa menggunakan pendekatan beban serta berdasarkan bukti laporan operasional tahun 2019 yang di catat sebagai beban. Yang tertuang dalam PSAP No. 5 Paragraf 13 PP No. 71 Tahun 2010 ialah pengakuan persediaan menggunakan basis akrual dan pengakuan yang dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten Minahasa tidak menggunakan basis akrual.

Pengukuran Persediaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa. Nilai persediaan ialah setiap barang yang di gunakan sesuai dengan biaya yang di dikeluarkan. Untuk mengukur penilaian persediaan berikut ini merupakan alternatif yang di gunakan untuk pengukuran nilai persediaan sesuai dengan PSAP BA No.5 Paragraf 15 PP No. 71 Tahun 2010: Dengan melakukan pembelian maka bisa di katakan biaya perolehan. Harga pokok produksi jika perolehannya dengan memproduksi sendiri. di kategorikan nilai wajar karena perolehannya di bisa dari donasi/rampasan.

Setelah melakukan penelitian pada BKPSDM Kabupaten Minahasa dan melakukan wawancara pada staf penyusun laporan keuangan pencatatan yang di lakukan ialah sesuai dengan harga pembelian yang merupakan bagian dari harga perolehan. Sehingga bisa di lihat bahwa penggunaan FIFO (First in First Out) di gunakan dalam pengukuran persediaan dan sudah sesuai dengan standar serta menggunakan metode sistematis seuai dengan penjelasan di poin pertama PSAP BA No. 05 Paragraf 17 PP No. 71 Tahun 2010.

Pengungkapan Persediaan BKPSDM Kabupaten Minahasa. Dalam pengungkapan kebijakan akuntansi yang ada pada BKPSDM di Kabupaten Minahasa ini sudah di ungkapkan dalam penggunaan pengukuran persediaan akhir dan sudah mengikuti PSAP BA No. 5 Paragraf 26 PP No. 71 Tahun 2010 dan dalam pengungkapannya di sebutkan, bahwa penggunaan pelaporan keuangan pengukuran persediaan BKPSDM sudah menggunakan kebijakan akuntansi. Setelah itu penjelasan PSAP No.5 pargaraf 26 di poin dua dan tiga ialah sebagai berikut:Kelanjutan dari penjelasan persediaan yaitu perlengkapan untuk melayani masyarakat, perlengkapan atau barang dalam proses produksi, dan barang yang di simpan yang memiliki tujuan untuk di jual serta barang yang dalam proses produksi yang akan di berikan pada masyarakat; Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa tidak ada data yang mengungkapkan persediaan yang tidak memenuhi kriteria di poin dua dan tiga, berdasarkan wawancara bersama penyusunan laporan keuangan dan keterangan yang sudah di berikan oleh bagian penyimpan barang BKPSDM Kabupaten Minahasa Bpk. D.T, yang memberikan pernyataan, "hingga Desember 2019 tidak ada persediaan yang mengalami kerusakan".

Dalam poin dua dan tiga yang tidak di ungkapkan di PSAP BA No. 5 Paragraf 26 PP No. 71 Tahun 2010 karena dalam persediaan yang di ungkapkan tidak ada masalah. Karena pada entitas bersangkutan sudah menyesuaikan dengan pengungkapan persediaan yang ada. Sehingga Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Minahasa tidak menyimpang dari PSAP BA No. 5 Paragraf 26.

Penerapan Akuntansi Persediaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Minahasa berdasarkan PSAP BA No. 5. Pengakuan persediaan dengan menggunakan pendekatan aset. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan di peroleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang bisa di ukur dengan andal hal ini telah di terapkan karena dalam pelaksanaan kegiatan perkantoran bisa di gunakan dengan baik. Kemudian pada saat di terima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah juga sudah di terapkan karena setelah melakukan pembelian hak kepemilikannya langsung berpindah. Selanjutnya dalam pengakuan persediaan dengan menggunakan beban. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan di peroleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang bisa di ukur dengan andal telah di terapkan karena setelah di gunakan di catat dalam catatan laporan persediaan dan pada saat di terima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pengukuran di ukur sebesar apabila biaya perolehan di peroleh dengan persediaan. Penerapannya telah di lakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) karena biaya perolehan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan biaya penanganan dan biaya lainnya. Harga pokok produksi apabila di peroleh dengan memproduksi sendiri hal ini tidak di terapkan, karena dalam menggunakan persediaan barang habis pakai ialah instansi pemerintahan yang tidak memproduksi sendiri barang yang di gunakan. Nilai wajar, apabila di peroleh dengan cara lainya seperti donasi/rampasan juga tidak di terapkan karena harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

Pengukuran beban persediaan. Beban persediaan di catat sebesar pemakaian persediaan sudah di terapkan karena pencatatan yang di lakukan ialah metode perpetual untuk jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan dengan menggunakan metode ini pencatatan di lakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/ jumlah persediaan selalu di perbarui. Dalam hal persediaan di catat secara perpetual maka pengukuran pemakaian persediaan di hitung berdasarkan catatan jumlah unit yang di pakai di kalikan dngan nilai perunit sesuai metode penilaian yang di gunakan hal ini tidak di terapkan karena dalam pencatatan keluar dan masuknya barang habis pakai hanya di catat pada saat terjadinya penambahan sehingga tidak memperbarui jumlah persediaan.

Pengungkapan kebijakan akuntansi yang di gunakan dalam pengukuran persediaan telah di terapkan karena dalam pencatatan keuangan Badan Kepegawaian Daerah Kab. Minahasa menggunakan pengukuran PSAP BA No. 71 Tahun 2010. Penjelasan selanjutnya persediaan seperti barang atau perlengkapan yang di gunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang di gunakan dalam proses produksi dan barang yang di simpan untuk di jual atau di serahkan kepada masyarakat, serta barang yang masih dalam proses produksi yang di maksudkan untuk di jual atau di serahkan kepada masyarakat tentunya tidak di terapkan karena penggunaan barang habis pakai di gunakan oleh instansi pemerintahan yang merupakan pengguna barang habis pakai itu sendiri sehingga tidak menjual atau memproduksi sendiri. Jenis, jumlah dan nilai persediaan tidak ada yang dalam kondisi rusak atau usang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian akuntansi persediaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ialah akuntansi persediaan BKPSDM di Kabupaten Minahasa sebagian besar sudah sesuai dengan aturan. Berdasarkan dengan pengukuran pendekatan aset, pengakuan persediaan yang di gunakan BKPSDM di Kabupaten Minahasa

yang artinya sudah sesuai berdasarkan PSAP BA 05 PP No. 71 Tahun 2010, pengukuran persediaan dan beban persediaan pada BKPSDM di Kabupaten Minahasa sudah menyesuaikan dengan PSAP BA 05 PP No. 71 Tahun 2010 dan dalam pengungkapan persediaan BKPSDM Kabupaten Minahasa sudah mengikuti aturan yang berlaku yaitu PSAP BA 05 PP No. 71 Tahun 2010. Pengukuran persediaan sebagian besar sudah mengikuti peraturan yang berlaku namun dalam pengukuran persediaan tidak di catat secara perpetual, yang di hitung berdasarkan jumlah unit karena dalam pencatatan yang di lakukan oleh BKPSDM hanya mencatat keluar dan masuknya barang di saat ada transaksi yang di lakukan sehingga tidak ada pembaruan dalam jumlah persediaan.

Dalam pengujian kredibilitas data untuk kepercayaan pada hasil penelitian yang telah di lakukan dalam penelitian kualitatif maka di lakukan dengan cara triangulasi. Teknik pengujian data ini di artikan sebagai pengecekan data yang di peroleh dari sumber yang sudah di tentukan kemudian mengumpulkan data, setelah itu bisa di deskripsikan, di kategorikan kemudian di analisa sehingga bisa memberikan kesimpulan. Sumber data dalam penelitian ini ialah catatan umum persediaan masuk dan persediaan keluar, pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Minahasa.

Sesuai dengan kesimpulan yang telah di uraikan, maka saran yang bisa di berikan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Minahasa ialah memberikan dan menciptakan laporan keuangan yang baik dan benar, BKPSDM Kabupaten Minahasa harus menganalisa transaksi yang benar agar supaya bisa di andalkan dan di pakai sebagaimana mestinya. Analisis laporan keuangan dan penjurnalan merupakan proses awal yang penting sehingga di perlukan tingkat pemahaman yang baik dalam pemberlakuan pengakuan, pengukuran, pengungkapan serta penyajian yang di perlukan dalam pencatatan dan untuk mengungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), BKPSDM Kabupaten Minahasa haruslah di ungkapkan dalam informasi mengenai pos-pos laporan keuangan dengan lengkap. Tujuannya agar dalam pencatatan transaksi lebih meningkat lagi, transparansi pelaporan keuangan dan tersediannya pemahaman yang baik, pada informasi keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhir, T., & Hakim, M. U. (2010). *Tugas akhir analisi perlakuan... m ubaidillah hakim*. 5, 1–7.
- Albar, M., Morasa, J., & Walandouw, S. K. (2018). Analisis Perlakuan Dan Pelaporan Akuntansi Barang Milik Negara Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04), 120–132. <https://doi.org/10.32400/gc.13.03.20041.2018>
- Irawati, I. (2016). Analisis Penerapan Akuntansi Persediaan dan Akuntansi Aset Tetap pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Soppeng (Studi Kasus pada Badan Kepegawaian dan di klat Daerah). *Skripsi, Universitas Negeri Makassar*.
- Mahardini, N. Y., & Miranti, A. (2018). Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015. *Jurnal Akuntansi : Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 5(1), 22. <https://doi.org/10.30656/jak.v5i1.500>
- Ninla Elmawati Falabiba. (2019). *濟無No Title No Title No Title*. 1–23.
- Psap, B., Pada, N. O., & Sakit, R. (2021). *PENERAPAN AKUNTANSI PERSEDIAAN OBAT-OBATAN Application Of Accounting For Medicines Inventory Based On PSAP No . 05 At Majene Regional Public Hospital*. 3(2), 163–175.
- Rezagi Meilano, E. C. (2020). JAAB: Jurnal of Applied Accounting And Business. *Sistem Pengelolaan Penjualan Dan Pemesanan Berbasis Web di Bumdes Lestari Jaya*, 2(1), 33–42.
- Rifai, R. P., Tinangon, J. J., & Fakultas. (2016). ISSN 2303-1174 R. P. Rifai., J.J.Tinangon. Evaluasi Kebijakan Akuntansi *Jurnal EMBA, Vol.5(No.219)*, 11–19. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/viewFile/15418/14965>

- Salle, A. (2017). Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah)*, 1(1), 1–19. <https://doi.org/10.52062/keuda.v1i1.740>
- Umboh, A. D., Tinangon, J. J., Perlakuan, A., Persediaan, A., No, P., di nas, P., Umboh, A. D., Tinangon, J. J., Umboh, A. D., & Tinangon, J. J. (n.d.). *KESEHATAN KOTA MANADO ANALYSIS OF ACCOUNTING TREATMENT OF INVENTORIES OF PSAP NO . 5 IN dinas KESEHATAN KOTA MANADO Oleh : Jurnal EMBA Vol . 9 No 2 April 2021 , Hal . 967-974. 9(5), 967–974.*
- Unggul, A. D. I., Stie, B., & Surakarta, A. U. B. (2020). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. *Judicious Journal of Management*, 1–15.
- Waworega, A. A., Manossoh, H., & Tangkuman, S. J. (2018). Analisis Penerapan Akuntansi Persediaan Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 214–219. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.20991.2018>
- Freddy Samuel Kawatu. 2019. Analisis Akuntansi Sektor Publik. Penerbit DEEPUBLISH (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)
- Erlina, dkk. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis AkruaI*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hery. 2014. *Akuntansi Dasar 1 dan 2*. Jakarta: PT Grasindo.
- Nordiawan, Deddi, dkk. 2009. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rudianto. 2012. *Pengantar Akuntansi “Konsep & Tehnik Penyusunan LK*. Jakarta: Erlangga.
- Mahmudi, SE., M.Si., Ak., CMA 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII PRESS
- V. Wiratna Sujarweni. 2011. *Akuntansi Sektor Publik Teori Konsep Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang *Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 *Lampiran I Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pernyataan Nomor 5 tentang Akuntansi Persediaan dan Pernyataan Nomor 7 tentang Akuntansi Aset Tetap*.
- Septiana, Tri. 2011. *Analisis Akuntansi Aset Tetap pada dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005)*. Padang: Universitas Andalas.